

RELEVANSI BUKU AJAR PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER (RPKPS) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Asnafiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Berbagai kegiatan berkaitan dengan pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil-hasil pengembangan telah dibukukan dan diterbitkan agar dapat dipahami oleh seluruh warga UIN Sunan Kalijaga. Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS) merupakan salah satu buku yang sudah diterbitkan pada tahun 2007. Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS) yang berlaku sejak tahun 2008 wajib dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu mata kuliah sebagai standar minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. RPKPS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan telah didukung oleh bahan ajar yang berupa Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akan tetapi buku tersebut belum seluruhnya dapat mendukung materi-materi yang ditetapkan dalam RPKPS. Oleh karenanya pengembangan lebih lanjut tentang buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dilakukan agar pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan efektif.

Kata kunci: Buku ajar, RPKPS

Pendahuluan

Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 14 Oktober 2004 menuntut adanya berbagai perubahan internal, baik dalam bidang akademik maupun manajemen, disamping perubahan fisik. Perubahan fisik penting, akan tetapi yang lebih penting adalah perubahan akademik yang diikuti oleh perubahan manajemen. Untuk ini telah dilakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Berbagai buku telah diterbitkan agar dapat dipahami oleh seluruh warga UIN Sunan Kalijaga. Buku-buku tersebut antara lain Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga, Buku Kurikulum UIN Sunan Kalijaga dan buku-buku silabus beberapa mata kuliah yang disusun dengan paradigma integrasi interkoneksi.¹ Buku-buku tersebut memberikan arah pendidikan dan perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan paradigma baru yang integratif-interkoneksi.²

Salah satu silabus yang telah disusun oleh UIN Sunan Kalijaga adalah silabus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Silabus ini merupakan acuan mengembangkan materi PKn. Pada tahun 2005 telah diterbitkan buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan dengan maksud agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok-pokok materi yang dikembangkan dalam buku ajar tersebut adalah Identitas Nasional, Negara dan Kewarganegaraan, Hubungan Agama dan Negara, Demokrasi, Masyarakat Madani dan Hak Asasi manusia.³

Di sisi lain pada tahun 2007 UIN Sunan Kalijaga telah menerbitkan buku tentang Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS). Buku ini berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pengajar

¹ TIM UIN Sunan Kalijaga, *RPKPS Mata Kuliah Inti Umum dan Institusional Umum*, UPM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, hlm. ii.

² *Ibid.*

³ Makhrus, Hamdan Daulay, Muzairi, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, ix-x.

atau dosen berkaitan dengan apa dan bagaimana perkuliahan yang integrative-interkoneksi dilaksanakan. Buku tersebut ditulis juga dimaksudkan untuk membuat standar minimal untuk pembelajaran setiap mata kuliah yang diajarkan di UIN Sunan Kalijaga. Standarisasi ini penting dilakukan agar proses pembelajaran yang menjadi kegiatan akademik yang utama dapat dilakukan dengan mengedepankan kualitas. Selanjutnya Rektor UIN Sunan Kalijaga menyatakan bahwa dosen dalam perkuliahan wajib mengacu pada RPKPS secara minimal yang merupakan penjabaran dari silabus. Dosen diminta untuk mengembangkan materi kuliah secara maksimal dengan mengacu pada RPKPS.⁴ RPKPS yang disusun dan mulai berlaku pada 15 Januari 2008 memuat materi-materi PKn yang lebih luas daripada materi-materi di dalam buku ajar yang sudah disusun oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang relevansi buku ajar PKn yang telah diterbitkan tahun 2005 dengan RPKPS yang berlaku sejak 2008. Temuan besarnya relevansi keduanya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan buku ajar yang telah diterbitkan oleh Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, sehingga pembelajaran PKn di UIN Sunan Kalijaga dapat berjalan sesuai dengan standart minimal yang telah tertuang dalam RPKPS .

Bahan Ajar

Bahan ajar adalah bahan atau materi perkuliahan yang disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.⁵ Ada berbagai bentuk proses perkuliahan yang dapat dilakukan oleh dosen. Bentuk perkuliahan akan menentukan macam-macam bahan ajar yang digunakan dosen.

⁴ TIM UIN Sunan Kalijaga, RPKPS... hlm. iv.

⁵ Paulina Panen dan Purwanto, *Penulisan Bahan Ajar*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001, hlm. 6.

Pada dasarnya kegiatan perkuliahan ada tiga macam. Pertama, pengajar sebagai fasilitator dan mahasiswa belajar mandiri. Bentuk perkuliahan ini disebut juga dengan belajar mandiri. Kedua, dosen sebagai sumber tunggal dan mahasiswa belajar darinya. Ketiga, pengajar sebagai penyaji bahan belajar yang dipilihnya atau yang dikembangkannya.⁶

Dalam belajar mandiri, mahasiswa menggunakan bahan belajar yang didesain secara khusus. Bahan tersebut dipelajarinya tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Jenis bahan belajar tersebut dapat berupa salah satu atau kombinasi dari program media, bahan cetak, film, kaset, slide dan sebagainya. Untuk bentuk kegiatan belajar mandiri, dosen harus mengembangkan bahan belajar mandiri yang biasanya disebut modul.

Bahan belajar mandiri biasanya digunakan pada sistem belajar jarak jauh, tetapi bahan belajar mandiri dapat juga digunakan dalam kelas biasa. Dalam hal seperti ini dosen berperan dalam mengontrol kemajuan mahasiswa dan membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya Atwi Suparman menjelaskan, bentuk kegiatan perkuliahan dimana dosen sebagai sumber tunggal dan mahasiswa belajar darinya disebut dengan perkuliahan konvensional. Kegiatan ini berlangsung dengan menggunakan dosen sebagai satu-satunya sumber belajar dan sekaligus berperan sebagai penyaji isi mata kuliah. Perkuliahan ini tidak menggunakan bahan ajar apapun kecuali garis-garis besar isi, beberapa transparansi, lembaran kertas yang berisi gambar, bagan, dan formulir yang digunakan dalam latihan selama perkuliahan berlangsung. Bahan-bahan yang perlu dibuat oleh dosen berbentuk program pengajaran yang berisi deskripsi singkat isi mata kuliah, topik dan jadwal untuk setiap kali pertemuan, tugas yang harus diselesaikan mahasiswa, bahan transparansi, gambar, bagan dan lain-lain. Bahan ini dikumpulkan atau dibagikan kepada mahasiswa

⁶ Atwi Suparman, *Desain Instruksional*, Pusat Antar Universitas, Depdiknas, Jakarta, 1993, hlm. 193.

selama proses perkuliahan berlangsung. Selain itu bahan yang perlu dibuat oleh dosen adalah strategi instruksional dan ntes yang biasanya dikenal dengan satuan acara perkuliahan (SAP).

Kegiatan perkuliahan ketiga adalah dosen sebagai penyaji bahan belajar yang dipilihnya. Kegiatan perkuliahan ini menggunakan bahan belajar yang telah ada "di lapangan". Bahan belajar ini dipilih dosen atas dasar kesesuaiannya dengan strategi instruksional yang telah disusunnya (SAP yang telah disusun dosen). Bahan perkuliahan yang disiapkan oleh dosen terdiri dari SAP, bahan instruksional yang telah ada di lapangan yang sesuai dengan SAP yang telah disusun, tes. Bentuk kegiatan perkuliahan ini banyak digunakan di tingkat perguruan tinggi. Para dosen menggunakan buku atau bagian-bagian tertentu dari berbagai buku yang diramunya sendiri.⁷ Bahan bahan tersebut tidak selalu diambil dari buku yang dicetak dalam bahasa Indonesia, tetapi juga seringkali dari buku-buku yang menggunakan bahasa asing.

Penyusunan bahan ajar adalah karakteristik dari system instruksional dimanapun proses instruksional terjadi, baik dalam system jarak jauh maupun dalam sistem perkuliahan tatap muka. Bahan ajar disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, kebutuhan mahasiswa, garis-garis program perkuliahan dan kontrak perkuliahan.⁸

Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dosen melalui beragam cara. Secara umum ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh dosen dalam menyusun bahan ajar yaitu:⁹ 1. menulis sendiri, 2. pengemasan kembali informasi, 3. penataan informasi.

Dosen dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses instruksional atau proses perkuliahan. Asumsi yang mendasari cara ini adalah bahwa dosen adalah pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu, dosen mempunyai kemampuan untuk

⁷ Ibid. hlm. 198.

⁸ Paulina Panen dan Purwanto, *Penulisan ...* hlm. 9

⁹ Ibid. hlm. 11.

menulis dan dosen mengetahui kebutuhan mahasiswa dalam bidang ilmu tersebut. Dosen sebagai pakar dalam bidang ilmu dapat menulis sendiri atau bergabung dengan beberapa pakar lain di bidang ilmu yang sama untuk menulis bahan ajar yang akan digunakan dalam proses perkuliahan.

Penulisan bahan ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan mahasiswa, yang meliputi kebutuhan pengetahuan, ketrampilan, bimbingan, latihan dan kebutuhan umpan balik. Dosen dapat mengetahui kebutuhan mahasiswa berdasarkan analisis intruksional yang telah dibuat untuk mata kuliah yang diampunya, berdasarkan SAP dan berdasarkan kontrak perkuliahan yang telah disusun. Jadi materi yang disajikan dalam bahan ajar adalah pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang tercantum dalam SAP yang meliputi seluruh perkuliahan sesuai ruang lingkup mata kuliah yang disusun dalam kontrak perkuliahan. Analisis kebutuhan belajar mahasiswa dapat dilakukan oleh dosen sendiri atau dengan bantuan perancang instruksional. Hasil dari penulisan bahan ajar yang dilakukan oleh dosen bukan cma kesedar bahan ajar yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan tetapi dosen akan memperoleh ketrampilan baru yaitu ketrampilan menulis bahan ajar.

Cara lain untuk menyusun bahan ajar adalah dengan cara mengemas kembali informasi. Dalam hal ini dosen tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi bahan ajar yang baik dan dapat dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Informasi yang sudah ada di pasaran dikumpulkan berdasarkan SAP dan kontrak perkuliahan, kemudian disusun kembali atau ditulis ulang dengan gaya bahasa dan strategi yang sesuai untuk menjadi suatu bahan ajar, juga diberi kompetensi yang kan dicapai. Hasil pengemasan kembali informasi merupakan cara penyusunan bahan ajar yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penulisan dari awal. Namun prosesnya menjadi lebih mahal

karena memerlukan proses memperoleh ijin dari pengarang asli.

Selain menulis sendiri, mengemas kembali informasi, pengembangan bahan ajar juga dapat dilakukan melalui penataan informasi (kompilasi). Cara ini hamper mirip dengan pengemasan informasi, namun dalam proses penataan tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan kuliah yanbuku teks, materi aqudiovisual dan informasi lain yang sudah ada di pasaran. Jadi materi-materi tersebut dikumpulkan, di foto copi dan dipakai secara langsung, setelah dipilih, dipilah dan disusun berdasarkan SAP. Materi-yang dikumpulkan harus sesuai dengan acuan dan sumber pustaka yang sudah tercantum dalam SAP. Sebaiknya sebelum melakukan penataan informasi, dosen diharapkan menghubungi pengarang/penerbit asli dari materi yang ditata untuk memperoleh hak cipta atas materi tersebut. Perbanyakkan sebanyak satu bab dari satu buku dengan pencantuman sumbernya untuk keperluan pendidikan masih dimungkinkan.¹⁰

Kurikulum dan Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UIN Sunan Kalijaga

Kurikulum merupakan salah satu unsur pendidikan yang memiliki peran sangat besar dalam menentukan mutu lulusan.¹¹ Untuk itu UIN Sunan Kalijaga melakukan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan antara lain menghasilkan kurikulum tahun 2005.

Kurikulum UIN Tahun 2005 telah dijabarkan dalam silabus yang merupakan perangkat kurikulum yang lebih operasional untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pada hakekatnya silabus merupakan seperangkat rencana dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan penilaian hasil belajar yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi dasar. Tahun 2005 di UIN Sunan Kalijaga telah dikembangkan silabus untuk mata kuliah.

¹⁰ Ibid. hlm. 20.

¹¹ UIN Sunan Kalijaga, *Silabus Mata Kuliah Inti Umum dan Institusional Umum*, Yogyakarta, 2006, hlm.3.

Pengembangan silabus dimulai dari Mata Kuliah Inti Umum dan Mata Kuliah Institusional Umum yang berjumlah 13 mata kuliah. Salah satu diantara mata kuliah Inti Umum adalah mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini diberikan pada semua jurusan atau program studi dengan bobot 2 sks dan merupakan elemen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Silabus ini berfungsi sebagai acuan bagi setiap dosen pengampu mata kuliah agar proses pembelajaran yang dilakukan setiap dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.¹² Dalam silabus terdapat unsur-unsur standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator, materi pokok strategi pembelajaran, waktu, sumber bahan dan evaluasi.

Standar kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa adalah: mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap kewargaan serta membentuk mahasiswa mempunyai kepribadian sebagai warga negara yang baik, cerdas dan bertanggung jawab. Standar kompetensi tersebut kemudian dijabarkan dalam sembilan kompetensi dasar sebagai berikut:¹³ 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup *civic education*, 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakekat dari identitas nasional, 3. Mahasiswa mampu memahami Negara dan kewarganegaraan, 4. Mahasiswa mampu memahami tentang konstitusi dalam suatu Negara, 5. Mahasiswa mampu memahami persoalan pemerintahan dan hubungan antara pemerintahan sipil dan militer, 6. Mahasiswa mampu memahami hubungan agama dan Negara, 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang demokrasi, 8. Mahasiswa mampu memahami konsep masyarakat madani, 9. Mahasiswa mampu memahami hakekat hak-hak asasi manusia.

¹² Ibid. hlm. 4.

¹³ Ibid. hal. 54-56.

Materi pokok materi yang telah disusun untuk mencapai kompetensi dasar tersebut sebagai berikut:¹⁴ 1. Pengantar *Civic Education*, 2. Identitas Nasional, 3. Kewarganegaraan, 4. Konstitusi, 5. Pemerintahan, 6. Relasi Agama dan Negara, 7. Demokrasi, 8. *Civil Society*, 9. HAM.

Materi pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub-sub materi. Ada 35 sub bahasan materi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu: 1. Pengertian civic education, 2. Ruang lingkup pembahasan civic education, 3. Identitas Pribadi dan Kelompok, 4. Pluralisme Bangsa, 5. Integritas Nasional, 6. Definisi Negara, 7. Unsur-unsur Negara, 8. Sifat Negara, 9. Tujuan dan Fungsi Negara, 10. Kewarganegaraan, 11. Hak warga Negara, 12. Kewajiban setiap warga Negara, 13. Arti konstitusi, 14. Sejarah Konstitusi, 15. Amandemen Konstitusi, 16. Hakekat pemerintahan, 17. Pemerintahan Sipil, 18. Pemerintahan Militer, 19. Hubungan antara pemerintahan sipil dan militer, 20. Teori teokrasi, 21. Simbiotik mutualistik, 22. Teori sekuler, 23. Hakekat demokrasi, 24. Sejarah perkembangan demokrasi, 25. Model demokrasi, 26. Prospek demokratisasi, 27. Pengertian dan sejarah civil society, 28. Karakteristik civil society, 29. Pilar tegaknya civil society, 30. Arti dan sejarah HAM, 31. Empat Generasi HAM, 32. HAM dan Islam, 33. Piagam Madinah, 34. Deklarasi Kairo, 35. Perlindungan HAM di Indonesia.

Silabus menjadi acuan dalam mengembangkan materi dalam buku bahan ajar.¹⁵ Bahan ajar berupa buku Pancasila dan Kewarganegaraan telah diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Buku ajar tersebut ditulis oleh tiga orang penulis. Buku tersebut memiliki spesifikasi khusus yang berbeda dengan buku-buku dasar lain pada umumnya. Aspek yang membedakan buku tersebut dengan buku lain pada umumnya adalah paradigma keilmuan yang dijadikan kerangka dasar, yaitu paradigma integrasi-interkoneksi. Sisi lain bedanya yaitu pada tampilan buku. Tampilan buku dilengkapi

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Makhrus, Hamdan Daulay, Muzairi, *Pancasila...* hlm. iv

dengan kompetensi dasar, peta konsep glosarium, tugas dan daftar buku acuan.¹⁶ Ada 6 materi pokok yang ditulis dalam buku ajar tersebut, yaitu identitas nasional, Negara dan kewarganegaraan, hubungan agama dan negara, demokrasi dan masyarakat madani dan hak asasi manusia. Belum semua materi pokok dalam silabus tertuang dalam buku ajar PKn. Ada tiga materi pokok yang belum tertuang dalam buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu: Pengantar *Civic Education*, Konstitusi dan Pemerintahan.

Ada sejumlah 20 sub bahasan yang belum tertuang dalam tertuang dalam buku ajar PKn. sebagai berikut: 1. Pengertian civic education, 2. Ruang lingkup pembahasan civic education, 3. Integritas Nasional, 4. Sifat Negara, 5. Kewarganegaraan, 6. Hak warga Negara, 7. Kewajiban setiap warga Negara, 8. Arti konstitusi, 9. Sejarah Konstitusi, 10. Amandemen Konstitusi, 11. Hakekat pemerintahan, 12. Pemerintahan Sipil, 13. Pemerintahan Militer, 14. Hubungan antara pemerintahan sipil dan militer, 15. Simbiotik mutualistik, 16. Prospek demokratisasi, 17. Arti dan sejarah HAM, 18. Empat Generasi HAM, 19. Deklarasi Kairo, 20. Perlindungan HAM di Indonesia.

Ini berarti bahwa ada sejumlah 15 sub materi dalam buku ajar PKn yang sesuai dengan sub-sub materi PKn dalam silabi. Dengan kata lain kesesuaian sub materi buku ajar PKn dengan silabi sebesar 43%.

Dilihat dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber bahan dalam pengembangan bahan ajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan tidak semua buku yang tertulis dalam silabus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan digunakan sebagai referensi dalam daftar pustaka yang ditulis pada setiap bab dalam buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan UIN Sunan Kalijaga. Pembahasan materi tentang Identitas Nasional, tidak ada satupun sumber bahan (buku) yang tertulis dalam silabi digunakan sebagai sumber bahan dalam buku ajar PKn. Akan tetapi dilihat dari jumlah buku yang digunakan sebagai sumber bahan, dalam silabi jumlah sumber bahan yang digunakan 3 buku, dalam buku ajar 23 buah buku.

¹⁶ Ibid. hlm. iv.

Pengembangan materi pokok tentang Kewarganegaraan yang tertuang dalam silabi menggunakan 2 buku, dalam buku ajar PKn sumber bahan yang digunakan sejumlah 10 buku. Satu buku yang sama-sama digunakan baik dalam silabi maupun buku ajar PKn adalah buku Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh Inu Kencana Syafei, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1994.

Pembahasan tentang hubungan agama dan Negara dalam silabi bersumber pada 3 buku, sedangkan buku ajar PKn tidak dicantumkan sumber bahan yang digunakan. Pembahasan tentang demokrasi dalam silabus bersumber dari 4 buku, dalam buku ajar PKn buku sumber yang digunakan sejumlah 30 buku. Dari sejumlah 30 buku tersebut yang sesuai dengan sumber bahan dalam silabus ada sejumlah 2 buku yaitu buku yang berjudul Demokrasi di Indonesia, tulisan Miriam Budiarto dan buku tulisan Mahfudh MD yang berjudul Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.

Silabus mata kuliah PKn menentukan sejumlah 3 buku untuk mengembangkan materi tentang masyarakat madani. Buku-buku tersebut adalah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, tulisan Ubaidillah, dkk. yang diterbitkan UIN Jakarta, Membongkar Mitos Masyarakat Madani tulisan Usman Widodo dan buku yang berjudul Masyarakat Madani tulisan Dawam Raharjo. Walaupun buku sumber yang digunakan dalam buku ajar PKn lebih banyak dari buku yang ditentukan dalam silabus, hanya ada satu buku yang sesuai dengan silabus yaitu buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, tulisan Ubaidillah, dkk. yang diterbitkan UIN Jakarta.

Hak asasi manusia merupakan materi akhir dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ajar PKn UIN Sunan Kalijaga juga menuliskannya di bab terakhir buku tersebut. Pengembangan materi tentang hak asasi manusia dalam silabus menggunakan 3 buku, sedangkan dalam buku ajar menggunakan 21 buku. Akan tetapi tidak satupun buku yang tertulis dalam silabus digunakan dalam buku ajar

PKn. Buku yang seharusnya digunakan dalam pengembangan materi tentang hak asasi manusia adalah buku tulisan Abu A'la al Maududi yang berjudul Hak asasi Manusia dalam Islam, Hak-hak Asasi Manusia tulisan Petter Davis dan tulisan Syafrudin Bahar yang berjudul Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 2002.

RPKPS dan Buku Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penulisan Buku Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS) UIN Sunan Kalijaga merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yaitu penulisan silabus. RPKPS memberikan pedoman bagi setiap dosen berkaitan dengan apa dan bagaimana perkuliahan yang integratif-interkoneksi dilaksanakan. Unsur-unsur yang terdapat dalam RPKPS sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam silabus ditambah dengan time line dan topik perkuliahan. Dalam buku RPKPS yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga telah disusun pula rencana pelaksanaan kuliah (RPK) berdasarkan time line dan topik perkuliahan yang telah direncanakan. RPKPS dijabarkan dalam 10 RPK. Rencana pelaksanaan perkuliahan memuat identitas mata kuliah, kompetensi dasar, indikator, strategi pembelajaran, sumber, alat, media, evaluasi dan prosedur pembelajaran.¹⁷

Dalam RPKPS dinyatakan bahwa mata kuliah Civic Education, yang dalam kurikulum UIN Sunan Kalijaga disebut dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai kompetensi memahami, menjelaskan, memecahkan serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan persoalan-persoalan aktual yang berkaitan dengan kewarganegaraan seperti toleransi, menghargai pluralitas, kesadaran hukum, tertib sosial, menjunjung tinggi HAM dan mengembangkan demokratisasi serta menghargai kearifan local (local wisdom). Kompetensi dasar yang

¹⁷ TIM UIN Sunan Kalijaga, RPKPS... hlm. 73-74.

dirumuskan dalam RPKPS tersebut adalah mahasiswa mempunyai kecakapan tentang pengetahuan kewarganegaraan, seperti demokrasi, HAM, Civil Society (Masyarakat Madani), toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan public dan mampu melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. Indikator hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa:¹⁸ 1. Memahami dan menghargai masalah pluralisme bangsa, 2. Menjelaskan masalah toleransi dan integritas nasionalisme, 3. Menjunjung tinggi tertib hukum dan tertib sosial, 4. Menerapkan dan menjunjung tinggi HAM, 5. Mengembangkan demokratisasi, 6. Menghargai kearifan lokal, 7. Berpartisipasi dalam penegakan civil society, 8. Berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan public, 9. Mampu melakukan control terhadap penyelenggaraan negara.

Untuk mencapai indicator sebagaimana tersebut diatas, ada 11 pokok bahasan dan 48 sub pokok bahasan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Jika dibandingkan dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat dalam silabus yang telah disusun UIN Sunan Kalijaga, pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam RPKPS jauh lebih luas daripada yang terdapat dalam silabus. RPKPS menambah dua pokok bahasan baru yaitu tentang *Good Governance* dan Otonomi Daerah. Pokok bahasan yang terdapat dalam kedua rencana perkuliahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁸ Ibid. hal. 68

Tabel.1
Materi Pokok Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaran
dalam Silabus dan RPKPS UIN Sunan Kalijaga

Silabus	RPKPS
1. Pengantar <i>Civic Education</i> .	1. Pendahuluan
2. Identitas Nasional.	2. Identitas Nasional
3. Kewarganegaraan.	3. Konsep Negara
4. Konstitusi.	4. Kewarganegaraan
5. Pemerintahan.	5. Konstitusi
6. Relasi Agama dan Negara.	6. Demokrasi
7. Demokrasi.	7. Pemerintahan Sipil dan Militer
8. <i>Civil Society</i> .	8. <i>Good Governance</i>
9. HAM	9. HAM
	10. Masyarakat Madani
	11. Otonomi Daerah

Apabila dalam silabus dari 9 materi pokok dijabarkan menjadi 35 sub bahasan, dalam RPKPS dari sejumlah 11 materi pokok dijabarka menjadi 40 sub pokok bahasan. Jumlah sub pokok bahasan dalam RPKPS lebih banyak daripada sub pokok bahasan dalam silabus. Sub pokok bahasan yang tidak tertuang dalam silabus sebagai berikut: 1. Istilah penting yang terkait dengan *Civic Education*, 2. Kompetensi dasar dan Tujuan Perkuliahan *Civic Education*, 3. Paradigma pendidikan kewarganegaraan, 4. Teori tentang pembentukan Negara, 5. Pengertian warga Negara, 6. Asas-asas kewarganegaraan, 7. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaran, 8. Problematika Status kewarganegaraan, 9. Cara memperoleh kewarganegaran Indonesia, 10. Unsur penegak demokrasi, 11. Prinsip dan parameter demokrasi, 12. Urgensi dan arti penting *good governance*, 13. Prinsip-prinsip *good governance*, 14. Bentuk-bentuk HAM, 15. HAM dalam konstitusi di Indonesia, 16. Pengertian otonomi daerah, 17. Sejarah otonomi daerah di Indonesia, 18. Arti penting otonomi daerah, 19. Model desentralisasi, 20. Prinsip otonomi daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999, 21. Pem-

bagian kekuasaan pusat dan daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999, 22. Otonomi daerah dan demokratisasi.

Materi tentang kewarganegaraan dituangkan baik dalam silabus maupun dalam RPKPS. Akan tetapi materi ini lebih dirinci lagi di dalam RPKPS. Hal ini lebih memberikan kejelasan kepada pengembang dalam pengembangan materi selanjutnya. Lingkup materi yang dibahas semakin menjadi lebih jelas. Hal sebaliknya terjadi pada materi tentang hubungan agama dan Negara. Sub bahasan pada silabus lebih terperinci daripada sub bahasan dalam RPKPS. Selengkapnya sub-sub bahasan materi Pancasila dan Kewarganegaraan dalam RPKPS sebagai berikut:¹⁸ 1. Pengertian Pendidikan kewarganegaraan, 2. Istilah penting yang terkait dengan *Civic Education*, 3. Kompetensi dasar dan Tujuan Perkuliahan *Civic Education*, 4. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, 5. Pengertian Identitas nasional, 6. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional, 7. Nasionalisme Indonesia, 8. Pengertian Negara, 9. Tujuan Negara, 10. Unsur-unsur Negara, 11. Teori tentang pembentukan Negara, 12. Teori hubungan agama dan Negara, 13. Pengertian warga Negara, 14. Asas-asas kewarganegaraan, 15. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, 16. Problematika Status kewarganegaraan, 17. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, 18. Hak dan kewajiban warga Negara, 19. Pengertian dan hakekat demokrasi, 20. Unsur penegak demokrasi, 21. Prinsip dan parameter demokrasi, 22. Sejarah Perkembangan demokrasi, 23. Urgensi dan arti penting *good governance*, 24. Prinsip-prinsip *good governance*, 25. Pengertian dan hakekat HAM, 26. Perkembangan pemikiran HAM, 27. Bentuk-bentuk HAM, 28. HAM dalam konstitusi di Indonesia, 29. Pengertian masyarakat madani, 30. Sejarah perkembangan masyarakat madani, 31. Karakteristik masyarakat madani, 32. Pilar-pilar penegak masyarakat madani, 33. Masyarakat madani dan demokratisasi, 34. Pengertian otonomi daerah, 35. Sejarah otonomi daerah di Indonesia, 36. Arti penting otonomi daerah, 37. Model

¹⁹ *Ibid.* hlm. 67-69.

desentralisasi, 38. Prinsip otonomi daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999. 39. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999, 40. Otonomi daerah dan demokratisasi.

Materi tersebut harus dipelajari oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sumber belajar diperlukan mahasiswa agar mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara efektif, sehingga kompetensi dasar yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. IN telah pada tahun 2005 telah menerbitkan buku ajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa lebih lanjut dalam buku ajar tersebut. Tabel di bawah ini dapat dipakai sebagai petunjuk untuk memperoleh pemahaman terhadap sub-sub bahasan dalam RPKPS.

Tabel 2.

Sub bahasan dalam RPKPS dan Buku Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sub bahasan dalam RPKPS	Buku Ajar Pancasila dan Kewargaan	
	Sub bahasan	halaman
1. Pengertian Pendidikan kewarganegaraan	-	
2. Istilah penting yang terkait dengan <i>Civic Education</i> .	-	
3. Kompetensi dasar dan Tujuan Perkuliahan <i>Civic Education</i> .	-	17-18 19-20
4. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan.	-	
5. Pengertian Identitas nasional.	Apa itu identitas nasional	29-30
6. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional.	Apa itu identitas nasional ----- Apa sebenarnya	44 41-44

7. Nasionalisme Indonesia	Negara itu	
8. Pengertian Negara.	Tujuan dan fungsi	30-41
9. Tujuan Negara.	negara	
10. Unsur-unsur Negara	Unsur-unsur	50-56
11. Teori tentang	negara	
pembentukan Negara.	Dari mana asal	
12. Teori hubungan agama	mula negara	
dan Negara.		
13. Pengertian warga	Bagaimana	
Negara.	hubungan agama	
14. Asas-asas	dan negara	
kewarganegaraan.	-	
15. Unsur-unsur yang	-	
menentukan	-	67-70
kewarganegaran.		
16. Problematika Status	-	75-80
kewarganegaraan.		81-84
17. Cara memperoleh	-	
kewarganegaran		84-90
Indonesia.	-	
18. Hak dan kewajiban		91-104
warga Negara.	Hakekat	104-108
19. Pengertian dan hakekat	demokrasi	
demokrasi.		
20. Unsur penegak	Unsur penegak	
demokrasi.	demokrasi	
21. Prinsip dan parameter	Prinsip dan	144-148
demokrasi.	parameter	
22. SejarahPerkembangan	demokrasi	
demokrasi.	Sejarah dan	
23. Urgensi dan arti	perkembangan	151-158
penting <i>good governance</i> .	demokrasi di Barat	
24. Prinsip-prinsip <i>good</i>	Sejarah demokrasi	
<i>governance</i> .	di Indonesia	
25. Pengertian dan hakekat	Islam dan	114-118
HAM.	demokrasi	

26. Perkembangan pemikiran HAM	----	118-130
27. Bentuk-bentuk HAM	Konsepsi HAM	
28. HAM dalam konstitusi di Indonesia.	dalam Islam	130-138
29. Pengertian masyarakat madani.	-	
30. Sejarah perkembangan masyarakat madani.	Substansi HAM	
31. Karakteristik masyarakat madani.	-	
32. Pilar-pilar penegak masyarakat madani.	Pengertian civil society	
33. Masyarakat madani dan demokratisasi.	Sejarah masyarakat madani	
34. Pengertian otonomi daerah.	Karakteristik masyarakat madani	
35. Sejarah otonomi daerah di Indonesia.		
36. Arti penting otonomi daerah.	-	
37. Model desentralisasi.	-	
38. Prinsip otonomi daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999.	-	
39. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam UU nomor 22 tahun 1999.	-	
40. Otonomi daerah dan demokratisasi.	-	

Data di atas menunjukkan masih ada 25 sub bahasan yang belum dikembangkan dalam buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan. Sub bahasan dalam buku ajar yang sesuai dengan sub bahasan dalam RPKPS sebanyak 15 sub bahasan (37,5%). Oleh karena itu perlu pengembangan lebih lanjut agar terwujud buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan UIN Sunan Kalijaga yang sesuai dengan RPKPS sebagai standar minimal mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan pengantar penerbit ketua Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga tentang perlunya penyempurnaan buku-buku ajar mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga demi efektifitas pembelajaran di di UIN Sunan Kalijaga.

Simpulan

UIN Sunan Kalijaga telah merumuskan Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS) yang berlaku sejak tahun 2008. RPKPS wajib dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu mata kuliah sebagai standar minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. RPKPS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan telah didukung oleh bahan ajar yang berupa buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akan tetapi buku tersebut belum seluruhnya dapat mendukung materi-materi yang ditetapkan dalam RPKPS. Oleh karenanya pengembangan lebih lanjut tentang buku ajar Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dilakukan agar pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atwi Suparman, *Desain Instruksional*, Pusat Antar Universitas, Depdiknas, Jakarta, 1993.
- Makhrus, Hamdan Daulay, Muzairi, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Paulina Panen dan Purwanto, *Penulisan Bahan Ajar*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001.

TIM UIN Sunan Kalijaga, *RPKPS Mata Kuliah Inti Umum dan Institusional Umum*, UPM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

UIN Sunan Kalijaga, *Silabus Mata Kuliah Inti Umum dan Institusional Umum*, Yogyakarta, 2006.